

Analisis Eksternalitas Kebijakan Pajak Progresif terhadap Redistribusi Pendapatan Nasional

Aulia Dyah Prameswari¹, Hendra Riofita²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155, KM. 15, Kel. Simpang Baru, Pekanbaru, 28293, Indonesia

E-mail: auliadyahprameswari@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7235>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 Jun 2026

Revised: 25 Jun 2026

Accepted: 02 Jul 2026

Kata Kunci:

Perpajakan,
Redistribusi,
Ketimpangan,
Kesejahteraan,
Pemerataan

Keywords:

Taxation,
Redistribution,
Inequality, Welfre,
Equity.



ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksternalitas kebijakan pajak progresif terhadap redistribusi pendapatan nasional serta mengidentifikasi dampak dan upaya peningkatan efektivitasnya. Rumusan masalah penelitian berfokus pada bagaimana eksternalitas positif dan negatif pajak progresif serta perannya dalam mendukung redistribusi pendapatan nasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui pemanfaatan data sekunder dari jurnal ilmiah buku artikel akademik dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif memberikan dampak positif berupa pengurangan kesenjangan pendapatan peningkatan penerimaan negara dukungan terhadap program kesejahteraan masyarakat dan peningkatan keadilan sosial. Namun demikian terdapat dampak negatif berupa potensi penghindaran pajak penurunan minat investasi dan meningkatnya beban pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak progresif dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak kualitas pengawasan transparansi pengelolaan penerimaan negara serta optimalisasi program redistribusi pendapatan sehingga diperlukan penguatan administrasi perpajakan berbasis teknologi secara berkelanjutan.

This research is motivated by the persistently high inequality in income distribution in Indonesia, indicating that the fruits of development have not been fully enjoyed equally. The objective of this study is to analyze the externalities of progressive tax policy on national income redistribution and to identify its impacts and efforts to improve its effectiveness. The research problem formulation focuses on the positive and negative externalities of progressive tax and its role in supporting national income redistribution. The method used is a qualitative descriptive approach with a literature study approach utilizing secondary data from scientific journals, books, academic articles, and official documents. The results show that progressive tax has a positive impact in the form of reducing income inequality, increasing state revenues, supporting public welfare programs, and improving social justice. However, there are negative impacts in the form of potential tax evasion, decreased investment interest, and an increased tax burden for high-income groups. The study concludes that the effectiveness of progressive tax is influenced by taxpayer compliance, the quality of oversight, transparency in state revenue management, and optimization of income redistribution programs. Therefore, sustainable strengthening of technology-based tax administration is necessary.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Aulia Dyah Prameswari, et al. (2026), Analisis Eksternalitas Kebijakan Pajak Progresif terhadap Redistribusi Pendapatan Nasional , 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7235>

PENDAHULUAN

Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Kondisi ini terlihat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah yang menunjukkan bahwa hasil

pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, Indonesia memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda di setiap daerah, sehingga terdapat wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, serta kesempatan ekonomi turut memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan memperlebar kesenjangan yang ada. Selain itu, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, ketidakmerataan kesempatan kerja, serta rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan rendah akan semakin besar, sehingga dapat menghambat upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketimpangan distribusi pendapatan menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan erat dengan keadilan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional (Tumbal et al., 2023).

Permasalahan ketimpangan tersebut erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal, salah satunya pajak, untuk mendorong pemerataan pendapatan. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan ekonomi melalui mekanisme redistribusi pendapatan. Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dalam teori ekonomi publik, pajak progresif khususnya pajak penghasilan dianggap mampu mendorong kontribusi yang lebih besar dari kelompok berpendapatan tinggi sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya di negara berkembang, peran pajak sebagai alat pemerataan masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, besarnya sektor informal, serta dominasi pajak tidak langsung yang cenderung memberikan beban lebih besar kepada kelompok berpendapatan rendah (Bunaia et al., 2025).

Sejalan dengan upaya pemerataan tersebut, kebijakan pajak progresif menjadi salah satu instrumen yang dinilai mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sistem pajak ini mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya redistribusi pendapatan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar kepada kelompok yang berpenghasilan lebih rendah. Melalui mekanisme tersebut, hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat secara luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya, sehingga akses terhadap layanan tersebut menjadi lebih merata. Selain itu, kebijakan pajak progresif juga berkaitan dengan aspek keadilan sosial karena setiap individu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Dengan demikian, pajak progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai salah satu kebijakan yang dapat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan di dalam suatu negara (Okta, 2026).

Selain itu, kebijakan redistribusi pendapatan yang dijalankan melalui pajak progresif memiliki peran strategis dalam memperkuat pemerataan ekonomi di masyarakat. Penerapan pajak progresif yang membebankan pajak lebih besar kepada kelompok berpenghasilan tinggi memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan kembali penerimaan tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan melalui berbagai program sosial. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial karena beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dalam pelaksanaannya, pajak progresif tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan distribusi sumber daya ekonomi sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemerataan dan redistribusi pendapatan, meskipun tetap diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat efektivitas penerapannya dalam berbagai kondisi ekonomi (Muyassar, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pajak progresif memiliki hubungan yang erat dengan upaya pemerataan pendapatan nasional melalui mekanisme redistribusi yang dilakukan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak progresif tidak hanya penting dalam aspek fiskal, tetapi juga

dalam aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Eksternalitas Kebijakan Pajak Progresif terhadap Redistribusi Pendapatan Nasional” guna memahami sejauh mana kebijakan tersebut berperan dalam menciptakan pemerataan pendapatan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai eksternalitas kebijakan pajak progresif serta pengaruhnya terhadap redistribusi pendapatan nasional melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan lembaga pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pajak progresif, redistribusi pendapatan, dan pemerataan ekonomi. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai referensi yang diperoleh dari Google Scholar, portal jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan dampak positif dan negatif kebijakan pajak progresif serta perannya dalam mendukung redistribusi pendapatan nasional. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pajak progresif dan kontribusinya terhadap upaya pemerataan pendapatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksternalitas Positif Kebijakan Pajak Progresif terhadap Redistribusi Pendapatan Nasional

1. Pengurangan Kesenjangan Pendapatan

Pajak progresif membantu memperkecil perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar sesuai dengan kemampuan ekonominya, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah dikenakan tarif yang lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung lebih ringan (Nasution et al., 2024). Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi pendapatan karena kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar memberikan kontribusi yang lebih besar pula kepada negara. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak kemudian menjadi sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan publik dan pembangunan. Dengan adanya perbedaan tarif berdasarkan tingkat penghasilan, kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin dapat dikurangi karena distribusi sumber daya ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, pajak progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pemerataan pendapatan, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, serta menciptakan kondisi masyarakat yang lebih adil dalam memperoleh manfaat pembangunan.

2. Peningkatan Penerimaan Negara

Selain membantu memperkecil kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah, kebijakan pajak progresif juga berperan dalam meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Melalui penerapan tarif pajak yang lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan besar, pemerintah memperoleh sumber pendapatan yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi negara dalam menyediakan layanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan dan

kesehatan, membangun infrastruktur, serta menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin optimal penerimaan pajak yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pajak progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas fiskal negara sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas (Nasution et al., 2024).

3. Dukungan terhadap Program Kesejahteraan Masyarakat

Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta berbagai bantuan pendidikan. Di bidang kesehatan, penerimaan pajak dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan, penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program kesehatan publik. Selain itu, dana pajak juga digunakan untuk mendukung program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan guna membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dampak kesenjangan ekonomi. Tidak kalah penting, penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana transportasi, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Prawitasari et al., 2025). Dengan adanya pemanfaatan dana pajak pada berbagai sektor tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dukungan terhadap program kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana pajak juga sejalan dengan temuan (Riofita, 2024) yang menekankan pentingnya inovasi layanan dalam meningkatkan kualitas dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks perpajakan, penerimaan pajak yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur merupakan bentuk layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Semakin baik pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut, maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara lebih optimal.

4. Peningkatan Keadilan Sosial

Pajak progresif mencerminkan prinsip keadilan karena penerapannya didasarkan pada kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Dalam sistem ini, beban pajak tidak diberikan secara sama rata kepada seluruh masyarakat, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas ekonomi masing-masing. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu berarti setiap orang membayar jumlah yang sama, tetapi setiap orang memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Dengan mekanisme demikian, pembagian beban pajak menjadi lebih proporsional dan tidak memberatkan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih terbatas. Penerapan pajak progresif juga mencerminkan adanya tanggung jawab bersama dalam mendukung pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pajak progresif sering dipandang sebagai bentuk keadilan dalam perpajakan karena mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat serta mendorong terciptanya keseimbangan dalam pembagian kewajiban kepada negara (Rahmawati, 2024).

Eksternalitas Negatif Kebijakan Pajak Progresif terhadap Redistribusi Pendapatan Nasional

1. Potensi Penghindaran Pajak

Tarif pajak yang tinggi dapat mendorong sebagian wajib pajak untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajaknya karena mereka merasa beban yang harus ditanggung semakin besar. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, wajib pajak berupaya menekan jumlah pajak yang harus dibayar melalui berbagai strategi yang masih berada dalam batas ketentuan hukum maupun dengan cara yang melanggar aturan perpajakan. Kecenderungan tersebut umumnya muncul ketika wajib pajak menilai bahwa tarif yang dikenakan terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan kemampuan dan kondisi usahanya. Akibatnya, tujuan kebijakan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dapat menjadi kurang optimal karena sebagian potensi penerimaan tidak dapat dihimpun secara maksimal. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara

dan kemampuan wajib pajak agar tingkat kepatuhan tetap terjaga serta risiko pengurangan kewajiban pajak dapat diminimalkan (Akbar & Hardiansyah, 2024).

2. Penurunan Minat Investasi

Sebagian pelaku usaha atau investor mungkin merasa terbebani oleh pajak yang tinggi karena kewajiban yang harus dipenuhi dapat mengurangi dana yang tersedia untuk kegiatan usaha dan pengembangan investasi. Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan mereka dalam melakukan ekspansi usaha, menambah kapasitas produksi, atau menanamkan modal pada kegiatan yang berpotensi meningkatkan produktivitas. Ketika sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pajak, kemampuan pelaku usaha untuk menyediakan dana bagi investasi menjadi lebih terbatas. Akibatnya, rencana pengembangan usaha sering kali ditunda atau dilakukan dalam skala yang lebih kecil dibandingkan yang direncanakan sebelumnya. Berkurangnya aktivitas investasi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan usaha serta mengurangi peluang terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Oleh karena itu, tingkat pajak yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan persepsi beban yang lebih besar bagi pelaku usaha dan investor sehingga dapat memengaruhi minat mereka untuk melakukan investasi (Muflikha & Furqon, 2022).

3. Beban Pajak yang Lebih Tinggi bagi Kelompok Berpenghasilan Besar

Dalam sistem pajak progresif, kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi diwajibkan untuk membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan rendah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak serta mendukung pemerataan pendapatan di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kewajiban tersebut dapat menimbulkan persepsi ketidakpuasan pada sebagian kelompok berpendapatan tinggi karena mereka merasa harus menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan kelompok lain. Kondisi ini dapat memunculkan anggapan bahwa kontribusi yang mereka berikan tidak selalu sebanding dengan manfaat yang diterima secara langsung. Perbedaan persepsi ini pada akhirnya dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan perpajakan, terutama jika tidak diimbangi dengan transparansi dan kejelasan dalam penggunaan dana pajak oleh pemerintah.

Tantangan Kebijakan Pajak Progresif dalam Redistribusi Pendapatan Nasional

Penerapan pajak progresif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas sistem perpajakan yang membuat proses administrasi menjadi lebih rumit serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Keterbatasan kapasitas institusi perpajakan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi informasi, turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemungutan pajak secara efektif (Syaharah & Widyanti, 2023). Tantangan lainnya adalah masih adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak, terutama apabila transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dianggap belum optimal. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya upaya penghindaran pajak yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan pajak progresif dalam mendukung redistribusi pendapatan (Judijanto, 2024). Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan, seperti penyederhanaan sistem perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak agar tujuan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Tantangan dalam penerapan pajak progresif yang berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan sejalan dengan temuan (Riofita, 2024) yang menunjukkan bahwa transparansi, pengendalian risiko, dan kejelasan sistem dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap suatu layanan. Dalam konteks perpajakan, transparansi pengelolaan dana pajak serta sistem pengawasan yang baik dapat mengurangi keraguan masyarakat dan meningkatkan keyakinan bahwa pajak dikelola secara tepat. Dengan meningkatnya kepercayaan tersebut, kepatuhan wajib pajak berpotensi meningkat sehingga pelaksanaan kebijakan pajak progresif dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung redistribusi pendapatan nasional.

Upaya Kebijakan Pajak Progresif dalam Redistribusi Pendapatan Nasional

1. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak progresif, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat

penting karena keberhasilan penerapan pajak progresif sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan sehingga tujuan redistribusi pendapatan dapat tercapai secara lebih efektif (Sejahtera et al., 2024). Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti memperluas sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat agar mereka memahami fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui sistem yang lebih mudah, cepat, dan berbasis teknologi juga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, penerimaan negara dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

2. Pengawasan dan Pengelolaan Pajak

Selain peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan dan pengelolaan pajak yang efektif juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pajak progresif. Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat meningkat, tanpa adanya sistem pengawasan yang baik masih terdapat kemungkinan terjadinya penghindaran maupun penggelapan pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih modern, seperti sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan, tetapi juga membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas perpajakan secara lebih akurat. Di samping itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan perlu dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Liana & Gosita, 2026). Dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik, potensi kebocoran penerimaan pajak dapat diminimalkan sehingga penerimaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Selain itu, pengawasan dan pengelolaan pajak yang efektif juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan penelitian (Riofita, 2022) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas sistem melalui kemudahan koordinasi, pengelolaan informasi, dan transparansi. Dalam konteks perpajakan, digitalisasi dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan yang lebih akurat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, pengawasan dan pengelolaan pajak yang didukung teknologi dapat membantu mengurangi pelanggaran perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara.

3. Optimalisasi Program Redistribusi Pendapatan

Setelah penerimaan pajak berhasil ditingkatkan melalui kepatuhan wajib pajak yang lebih baik serta pengawasan yang efektif, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan program redistribusi pendapatan. Optimalisasi ini penting karena tujuan utama dari kebijakan pajak progresif bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak yang terkumpul perlu dialokasikan secara tepat sasaran untuk membiayai berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi kelompok berpendapatan rendah (Muyassar, 2024). Melalui pemanfaatan dana pajak yang efektif, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dan fasilitas publik. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari kontribusi yang mereka berikan. Dengan optimalisasi program redistribusi pendapatan yang baik, kebijakan pajak progresif dapat berfungsi secara maksimal dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak progresif memiliki peran penting dalam mendukung redistribusi pendapatan nasional melalui mekanisme pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Penerapan kebijakan ini memberikan eksternalitas positif berupa pengurangan kesenjangan pendapatan, peningkatan penerimaan negara, dukungan terhadap program kesejahteraan masyarakat, serta penguatan keadilan sosial. Di sisi lain, kebijakan ini juga

menimbulkan beberapa eksternalitas negatif berupa potensi penghindaran pajak, penurunan minat investasi, serta munculnya persepsi beban yang lebih besar bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pajak progresif dalam mewujudkan pemerataan pendapatan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pengawasan, serta pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan perpajakan, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, serta penyaluran dana pajak yang tepat sasaran perlu terus dilakukan agar tujuan redistribusi pendapatan dapat berjalan lebih efektif dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 923–934.
- Bunaia, A., Septia, A. T., & Zein, A. W. (2025). Pengaruh Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan (Studi Kasus Di Negara Berkembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 165–172.
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514.
- Liana, I. K. A., & Gosita, I. B. P. C. D. (2026). Ketimpangan Transparansi Dalam Pengelolaan Pajak : Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 51–62.
- Muflikha, & Furqon, I. K. (2022). Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 4(2).
- Muyassar. (2024). Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan Dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Political Studies*, 4(1), 1–10.
- Nasution, A. R., Hutabarat, F. B., Wati, F., Kristiani, M., Rina, Diani, S., & Akmalia, U. (2024). Analisis Hubungan Antara Pajak Progresif Dan Ketimpangan Serta Kaitannya Dengan Pilihan Publik. *Journal Of Education Transportation And Business*, 1(2), 779–785.
- Okta. (2026). Kebijakan Pajak Thr 2026: Fokus Pada Pemerataan Pendapatan Nasional. *Tekokrat.Ac.Id*.
- Prawitasari, A., Yodista, & Hidayah, N. R. (2025). Perpajakan Di Masyarakat Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan. *Journal Of Law, Social Science, And Management Review*, 1(3), 101–104.
- Rahmawati, Y. R. (2024). Keadilan Sosial Dalam Pajak Progresif: Bagaimana Sistem Pajak Mempengaruhi Beban Warga Kaya Dan Miskin Di Indonesia. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 47–56.
- Riofita, H. (2022). Developing Digital Empowerment Programs To Enhance The Marketing Performance Of Private Islamic Higher Education Institutions. *Muslim Business And Economic Review*, 1(2), 257–280. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.70>
- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity And Risk Control Role On Willingness To Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.353>
- Riofita, H. (2024). Strengthening The Competitive Image Of Private Islamic Higher Educational Institutions In Indonesia As An Effective Marketing Material : The Mediating Role Of Service Innovation. *Journal Of Sti Policy And Management*, 9(2), 73–85. <https://doi.org/10.14203/stipm.2024.404>
- Sejahtera, A. C. S., Daksa, N. D. B., Saragih, D. P., Fazya, N. A., & Nugrahimsyah5, D. H. (2024). Peran Dan Upaya Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 102–106.
- Syahrar, D. P., & Widyanti, Y. (2023). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pengrajin Songket Di Kota Palembang. *Edunomika*, 08(01), 1–14.
- Tumbal, J., Kawung, G. M. V., & Rompas, W. F. I. (2023). Determinan Ketimpangan Distribusi

Pendapatan Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 23(9), 133–144.